

Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki pada Berita Tempo.co Tentang Ruu Perampasan Aset

Emma Fitriana^{1*}, Latutik Mukhlisin², Malik Ibarhim³, Fajar Istikhomah⁴
emafitriana1984@gmail.com¹, lm818@ummad.ac.id², mi747@ummad.ac.id³, istikhomahfajar@gmail.com⁴

¹Universitas Muhammadiyah Madiun, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Madiun, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Madiun, Indonesia

⁴UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Indonesia

*Korespondensi: ✉ lm818@ummad.ac.id

Abstrak

Pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh Tempo.co menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Sebagai media yang dikenal dengan gaya jurnalistik kritis dan independen, Tempo.co tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membentuk narasi kompleks yang mencerminkan keterkaitan antara hukum, politik, dan kepentingan publik. RUU Perampasan Aset sendiri merupakan isu yang memicu polarisasi dalam wacana publik, terutama karena berkaitan langsung dengan agenda pemberantasan korupsi.

Status Artikel:

Diterima: 11-07-2025

Direvisi: 25-07-2025

Diterima: 02-08-2025

Kata Kunci:

Media online, RUU Perampasan Aset, Analisis Framing, Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, Tempo.co

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai pemberitaan mengenai RUU Perampasan Aset dengan menggunakan model framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode analisis framing yang mencakup empat struktur: sintaksis, skrip (naratif), tematik, dan retorik. Data dikumpulkan melalui observasi, penelusuran digital, seleksi berita, dan dokumentasi. Validitas data diuji menggunakan teknik audit trail.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo.co secara konsisten membangun narasi yang kritis terhadap kelambanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mendorong percepatan pengesahan RUU sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi. Framing dominan yang muncul adalah "Reformasi Hukum vs. Kelambanan Politik", yang terlihat dalam struktur sintaksis dan naratif, antara lain melalui penggunaan frasa seperti "Butuh Keberanian Politik DPR" yang merepresentasikan DPR sebagai lembaga yang lamban dan enggan mengambil risiko. Struktur tematik menempatkan RUU sebagai instrumen utama dalam perang melawan korupsi, didukung oleh sub-tema seperti Non-Conviction Based Forfeiture (NCB) dan perbandingan dengan praktik internasional. Sementara itu, struktur retorik memperkuat narasi melalui penggunaan metafora, kutipan tokoh otoritatif, dan dramatisasi dampak korupsi.

Framing yang dibangun oleh Tempo.co cenderung mengonstruksi opini publik yang pro-pemerintah dan anti-DPR, mencitrakan pemerintah dan aktivis antikorupsi sebagai aktor progresif, sementara DPR diposisikan sebagai penghambat reformasi. Temuan ini menunjukkan potensi pengaruh media dalam membentuk persepsi publik, sekaligus menyoroti pentingnya pemahaman kritis terhadap kompleksitas proses legislasi.



© 2025 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

RUU Perampasan Aset telah menjadi salah satu isu paling polarisasi dalam wacana publik belakangan ini. Di satu sisi, RUU ini dianggap sebagai terobosan penting dalam memerangi korupsi yang telah lama menggerogoti Indonesia, namun di sisi lain menuai kritik tajam karena dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menjadi alat represif (Nasution,2024). Kontroversi ini semakin memanas ketika berbagai kepentingan politik mulai bermain dalam proses pengesahannya, menciptakan medan pertarungan wacana yang sengit di ruang public (Ramadhani,2024).

Tempo.co sebagai media mainstream ternama memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap RUU Perampasan Aset. Analisis awal menunjukkan bahwa media ini cenderung menonjolkan aspek perlawanan terhadap korupsi dalam pemberitaannya, sekaligus tidak menghindari dari mengkritik potensi penyalahgunaan wewenang dalam implementasi RUU tersebut (Najib,2023). Pendekatan semacam ini mencerminkan posisi unik media sebagai penjaga demokrasi sekaligus pengawas kekuasaan.

Data terkini menunjukkan bahwa pemberitaan tentang RUU ini mengalami fluktuasi yang menarik. Menurut penelitian Rofiqi dan Akbar, sentimen negatif mendominasi diskusi publik di media sosial terkait RUU ini, dengan tingkat keterlibatan yang tinggi terutama di platform Twitter (Rofiqi,2024). Temuan ini diperkuat oleh Nugroho dan Hasan, yang mengungkap kompleksitas opini masyarakat yang tercermin dalam beragamnya sudut pandang yang muncul di media online (Nugroho,2023). Yang lebih menarik lagi, frekuensi pemberitaan menunjukkan pola yang konsisten meningkat setiap kali ada perkembangan signifikan dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset(Irawan, 2023). Hal ini menunjukkan betapa media memiliki peran sentral dalam mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu kebijakan tertentu, sekaligus membentuk cara masyarakat memahaminya (Dian Pertiwi, 2021). Komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan interpersonal dan sosial, membangun kepercayaan, serta menekan potensi konflik akibat perbedaan perspektif. Konsep ini relevan untuk analisis framing media dalam konteks RUU Perampasan Aset, karena framing bisa memicu persepsi dan interpretasi yang berbeda di Masyarakat (Ridha et al. (2025).

Dalam konteks inilah penelitian tentang framing media menjadi sangat relevan. Di era digital dimana informasi mengalir deras, kemampuan media dalam membongkar realitas memiliki dampak langsung pada opini public (Putra, 2022). Analisis framing menjadi penting tidak hanya untuk memahami mekanisme kerja media, tetapi juga untuk mengurai bagaimana kebijakan publik dipahami dan akhirnya diterima atau ditolak oleh Masyarakat (Deha, 2021). Sayangnya, meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang RUU Perampasan Aset, belum ada yang secara khusus mengkaji bagaimana Tempo.co sebagai media terkemuka membongkar

isu RUU Perampasan Aset. Padahal, sebagai media yang memiliki pengaruh luas, cara Tempo.co menyajikan berita tentang RUU Perampasan Aset dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya gap dari penelitian sebagai kontribusi novelty atau kebaruan dari penelitian tentang RUU Perampasan Aset dalam bingkai media Tempo.co.

Penelitian karya Clemente dan Gabbioneta yang mengkaji tentang skandal Volkswagen mengungkap bagaimana media Jerman membangun narasi kegagalan tata kelola korporat yang kemudian mendominasi wacana public (Clemente, 2017). Temuan serupa muncul dalam penelitian Adisa et al di Malaysia, di mana framing konflik etnis oleh media ternyata memperuncing polarisasi social (Adisa, 2016). Kasus-kasus ini membuktikan bahwa media tidak sekadar melaporkan fakta, melainkan secara aktif membangun realitas melalui pemilihan bingkai tertentu.

Meskipun pengaruh media online terhadap opini publik telah banyak diteliti di tingkat global, studi tentang pola framing media Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, seperti ditunjukkan Kim dan Kim serta Lynch, framing media terhadap kebijakan kontroversial seringkali menciptakan dinamika kompleks antara pemberitaan dan opini public (Hwalbin Kim, 2018). Integrasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif oleh Shehata bisa menjadi solusi untuk memahami framing media Indonesia secara lebih holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi pola framing, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap persepsi public (Shehata, 2013). Sintesis berbagai penelitian di atas menegaskan pentingnya analisis framing mendalam dengan model Pan dan Kosicki dalam konteks media Indonesia. Pemahaman tentang bias media dan mekanisme framing terhadap isu kompleks seperti RUU Perampasan Aset tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga penting untuk memahami interaksi antara media, kebijakan publik, dan opini masyarakat.

RUU Perampasan Aset merupakan rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Indonesia dengan tujuan utama memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, terutama korupsi. Inisiatif legislatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan instrumen hukum yang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara (Pantoli, 2023). Berbeda dengan mekanisme konvensional yang mensyaratkan vonis pidana terlebih dahulu, RUU ini mengadopsi pendekatan *in rem* yang memungkinkan penyitaan aset berdasarkan bukti kepemilikan ilegal, terlepas dari status proses hukum terhadap pelakunya.

Konsep perampasan aset *in rem* dalam RUU ini merupakan terobosan penting dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan otoritas terkait untuk bertindak lebih cepat dalam mengamankan aset-aset yang diduga hasil kejahatan sebelum sempat dihilangkan atau dipindahtanggankan (Ismail, 2024). Dengan demikian, RUU ini dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem sebelumnya yang seringkali membuat proses pengembalian aset menjadi tertunda atau bahkan gagal karena berbagai hambatan prosedural. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat mendesak mengingat tingginya angka korupsi di Indonesia yang terus membebani perekonomian negara (Azkia, 2023). Urgensi RUU ini juga terlihat dari kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih terpadu dan koheren. Saat ini, berbagai lembaga penegak hukum seringkali bekerja sendiri-sendiri dalam menangani kasus korupsi dan pengembalian aset (Syarifudin, 2023)

Di tengah pesatnya transformasi digital, media online Indonesia telah berevolusi untuk memenuhi tuntutan konsumsi informasi yang serba cepat dan interaktif. Tempo.co menempati posisi unik dalam lanskap ini dengan mengembangkan gaya jurnalisme digital yang khas, yang tercermin dalam empat aspek utama yakni model pemberitaan, standar verifikasi, adaptasi teknologi, dan interaktivitas dengan pembaca.

Sebagai pionir jurnalisme digital, Tempo.co mengadopsi model pemberitaan yang mengutamakan kecepatan tanpa mengorbankan kedalaman analisis. Penelitian Kyriakidou & Garcia-Blanco mengonfirmasi bahwa platform digital seperti Tempo.co mampu memangkas waktu produksi berita secara signifikan dibandingkan media konvensional (Kyriakidou, 2021). Tempo.co menjaga reputasinya melalui sistem verifikasi berlapis yang ketat. Standar akurasi yang tinggi ini menjadi benteng melawan misinformasi sekaligus penanda kredibilitas di mata pembaca kritis. Temuan Hamzah dkk memperkuat argumen bahwa inovasi teknologi dalam jurnalisme harus berjalan beriringan dengan penguatan prosedur verifikasi yang telah menjadi sebuah prinsip yang dipegang teguh Tempo.co (Hamzah et al, 2020).

Interaktivitas menjadi ciri pembeda utama Tempo.co. Dengan menyediakan ruang komentar, polling, dan fitur partisipatif lainnya, platform ini mengubah pembaca dari konsumen pasif menjadi mitra aktif dalam produksi berita (Muslimah, 2022). Holton et al mencatat bahwa model semacam ini tidak sekadar meningkatkan engagement, tetapi juga membangun relasi kepercayaan jangka panjang dengan audiens yang sulit dicapai media konvensional dengan model komunikasi satu arah (Holton, 2020).

Framing media merupakan konsep kunci dalam komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana media membingkai, menyeleksi, dan menyajikan suatu isu untuk membentuk persepsi publik. Lebih dari sekadar penyampaian fakta, framing melibatkan proses konstruksi realitas di mana media menonjolkan aspek tertentu sambil mengabaikan yang lain, sehingga mempengaruhi cara audiens memahami suatu peristiwa (Pastukhov, 2023). Perkembangan teori framing kemudian diperkaya oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang mengidentifikasi empat elemen utama dalam analisis framing media yakni sintaksis (pengaturan bahasa dan struktur teks), skrip (alur naratif), tematik (ideologi yang mendasari), dan retorik (teknik persuasi). Keempat elemen ini bekerja secara simultan untuk menciptakan makna, seperti terlihat dalam penelitian Sari et al yang menunjukkan bagaimana media memilih angle tertentu untuk membentuk opini publik tentang isu social (Sari, 2021).

Dengan demikian, framing bukanlah proses netral, melainkan upaya strategis untuk mengarahkan interpretasi audiens. Dalam berbagai penelitian framing, media tidak hanya membentuk bagaimana isu dipresentasikan, tetapi juga bagaimana masyarakat merespon secara emosional dan politis. Sebagai contoh, penelitian Analisis Framing Berita Pemilihan Raya Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023 yang dipublikasikan di Komsospol menunjukkan bahwa framing dalam berita Pemira mempengaruhi keputusan politik mahasiswa melalui representasi kandidat dalam media kampus dan media digital. (Reni, Nursalamah, Julistiana, et al., 2025).

Empat struktur framing yang diajukan Pan dan Kosicki memungkinkan analisis mendalam terhadap teks berita, mulai dari tingkat mikro yakni pemilihan kata hingga makro seperti ideologi yang mendasarinya. Dengan memeriksa elemen-elemen ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana media mempengaruhi opini publik terkait RUU Perampasan Aset tersebut. Terdapat empat unit analisis dalam framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki,

yaitu struktur sintaktis yang menekankan berperan penting dalam membentuk persepsi audiens melalui pilihan kata, frasa, dan hubungan antarkalimat (Silke and Graham). Struktur naratif yang berfokus pada cara cerita disusun, termasuk alur, sudut pandang, dan karakterisasi aktor. Media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga membangun narasi dengan protagonis, antagonis, dan konflik tertentu. Struktur tematik berperan sebagai fondasi ideologis yang membentuk keseluruhan narasi berita. Elemen ini tidak hanya mengidentifikasi tema dominan, tetapi juga mengungkap nilai, norma, dan kepentingan yang mendasari pemberitaan. Struktur retorik melibatkan gaya bahasa, metafora, dan strategi persuasi dalam pemberitaan. Misalnya, penggunaan diksi seperti "darurat korupsi" atau "ancaman terhadap kedaulatan hukum" dapat membangkitkan emosi pembaca.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengeksplorasi konstruksi bingkai media online terkait isu Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset bagi koruptor. Locus studinya adalah platform media digital Tempo.co, dengan objek analisis berupa konten pemberitaan terkait isu Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset bagi pelaku korupsi setelah melalui pencarian digital dan seleksi berita.

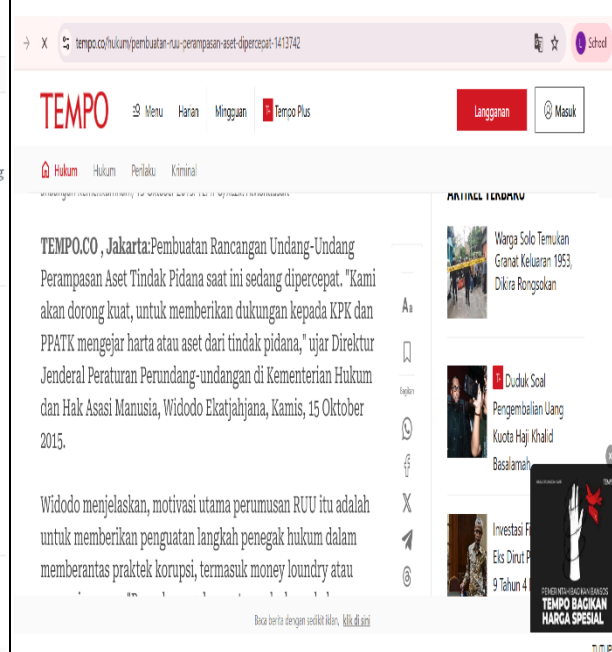
Pendekatan observasi nonpartisipan digunakan untuk menganalisis dokumen berita dari platform media online Tempo.co. Proses observasi mencakup pencarian berita digital dan seleksi berita untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan kebutuhan penelitian sekaligus mengurangi potensi bias. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan validitas dan relevansi data yang dikumpulkan. Peneliti memanfaatkan berbagai parameter pencarian, seperti kata kunci spesifik, filter kategori, memilih berita dengan jenis opini, straight news, dan investigasi untuk memastikan alur berita selaras dengan teori Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, dan rentang waktu publikasi, untuk memperoleh hasil yang lebih terfokus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Berita Tempo.co Tentang RUU Perampasan Aset Dalam Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Setelah melalui proses observasi, pencarian berita digital dengan menggunakan kata kunci "RUU Perampasan Aset", penelitian ini menemukan sebanyak 10 artikel berita yang membicarakan tentang RUU Perampasan Aset di Tempo.co. Dari 10 artikel berita kemudian dilakukan seleksi dan filter untuk menentukan objektifitasnya, diperoleh 4 berita yang akan dianalisis. Diantara 4 berita yang dipilih memiliki saling keterhubungan dari segi pro dan kontranya. Berita tersebut diterbitkan mulai bulan Oktober 2015 hingga tahun 2025.

Berita 1 : Pembuatan RUU Perampasan Aset Dipercepat



Berita yang pertama kali diterbitkan oleh Tempo.co terkait RUU Perampasan Aset yang berjudul "Pembuatan RUU Perampasan Aset Dipercepat" terbit pada 16 Oktober 2015 jam 04.10 WIB.

Berita 2 : DPR Bakal Bahas RUU yang Mandek setelah Pelantikan Pimpinan Komisi



Berita kedua yang diterbitkan oleh Tempo.co terkait RUU Perampasan Aset yang berjudul "DPR Bakal Bahas RUU yang Mandek setelah Pelantikan Pimpinan Komisi" pada tanggal 23 Oktober 2024 jam 05.50 WIB.

Berita 3 : RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, Pengamat Hukum: Butuh Keberanian Politik DPR

TEMPO Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Hukum Hukum Perilaku Kriminal

RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, Pengamat Hukum: Butuh Keberanian Politik DPR

Pengamat hukum menilai masyarakat memandang instrumen RUU Perampasan Aset sebagai langkah strategis memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

12 Desember 2024 | 20.10 WIB

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Integritas Nasional (AMINAS) menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Dalam aksi tersebut,

RANCANGAN Undang-Undang Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar RUU yang diusulkan **DPR** untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Pada pertemuan dengan media di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum di Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan **RUU Perampasan Aset** sudah ada di DPR sejak April 2023. Namun pembahasannya tak berjalan lantaran bertepatan dengan momen tahun politik, yakni Pilpres 2024.

Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga, Hardjuno Wiwoho, menilai persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset membutuhkan keberanian politik dan keberanian

Baca berita dengan sedikit iklan, [klik di sini](#)

Berita ketiga yang diterbitkan oleh Tempo.co terkait RUU Perampasan Aset yang berjudul " RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, Pengamat Hukum: Butuh Keberanian Politik DPR" terbit pada tanggal 12 Desember 2024 jam 20.10 WIB.

Berita 4 : Alasan Mengapa RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan



Berita keempat yang diterbitkan oleh Tempo.co terkait RUU Perampasan Aset yang berjudul "Berita Alasan Mengapa RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan" terbit pada tanggal 14 April 2025 jam 08.55 WIB.

B. Analisis Berita RUU Perampasan Aset Melalui Model Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap pemberitaan mengenai RUU Perampasan Aset yang diterbitkan Tempo.co telah membentuk konstruksi realitas media melalui pilihan struktur narasi. Berita ini tidak hanya menyajikan fakta legislatif, tetapi juga membingkai isu melalui sudut pandang tertentu, mulai dari urgensi pengesahan, hambatan

politik, hingga implikasi hukum. Analisis ini akan mengurai empat elemen framing Pan & Kosicki yakni sintaksis (struktur penyajian berita), skrip (alur narasi), tematik (pesan inti), dan retorik (strategi persuasi).

Tabel 1. Analisis Berita RUU Perampasan Aset Pada Tempo.Co.

Dimensi	Berita 1 (2015/10)	Berita 2 (2024/10)	Berita 3 (2024/12)	Berita 4 (2025/4)	Ringkasan
Sintaksis	Headline, teknis, pejabat pemerintah, Solusi legislative	Headline mandek, fokus prosedur DPR.	Headline evaluatif, kritik DPR, seruan moral.	Headline urgensi, dukungan Presiden & ICW.	Perubahan dari teknis ke procedural ke evaluatif ke urgensi.
Skrip (5W + 1H)	Who: Pemerintah; Why: celah hukum; How: percepatan RUU.	Who: DPR; Why: pimpinan komisi belum ada; How: inventarisasi.	Who: DPR & pengamat; Why: resistensi politik; How: dorongan moral.	Who: Presiden, pengamat, ICW; Why: kerugian negara; How: sahkan segera.	Aktor dominan bergeser dari pejabat ke DPR ke pengamat, ke Presiden.
Tematik	Problem dan solusi legislatif.	Mandek akibat prosedur internal DPR	Penundaan karena resistensi politik dilakukan evaluasi moral.	Krisis akibat legitimasi otoritas dan ada rekomendasi.	Narasi makin persuasif & evaluatif.
Retoris	Leksikon teknis, netral.	Leksikon birokratis, netral.	Leksikon moral, konflik.	Leksikon urgensi, otoritatif.	Diksi bergeser dari teknis ke moral-krisis
Interpretive Pattern	Masalah: celah hukum. Kausal: instrumen lemah. Evaluasi: negara wajib menutup celah. Rekomendasi: percepatan RUU.	Masalah: mandek. Kausal: prosedural. Evaluasi: netral. Rekomendasi: inventarisasi.	Masalah: penundaan. Kausal: resistensi politik. Evaluasi: DPR kurang berani. Rekomendasi: sahkan segera.	Masalah: kronis & merugikan negara. Kausal: DPR lamban. Evaluasi: DPR lalai. Rekomendasi: sahkan segera dan pengawasan.	Evolusi framing dari teknis ke prosedural ke evaluatif dan urgensi nasional

Sumber : Analisis Framing Zhongdang Pan Berita RUU Perampasan Aset pada Tempo.Co

Hasil analisis framing terhadap empat berita Tempo.co mengenai RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya transformasi bingkai pemberitaan selama satu dekade. Dimulai dari tahun 2015 hingga 2025, setiap berita memiliki perbedaan penekanan dalam dimensi sintaksis, skrip, tematik, dan retorik yang secara langsung membentuk pola interpretatif tertentu.

Dimensi Sintaksis

Secara sintaksis, keempat berita memperlihatkan perbedaan struktur dan fokus pemberitaan. Berita pertama (2015) menampilkan headline “Pembuatan RUU Perampasan Aset Dipercepat”, dengan *lead* yang menekankan pernyataan pejabat pemerintah tentang percepatan

proses. Sintaksis ini mencerminkan sudut pandang teknokratis dan birokratis. Berbeda dengan itu, berita kedua (Oktober 2024) menghadirkan headline “DPR Bakal Bahas RUU yang Mandek setelah Pelantikan Pimpinan Komisi” yang menonjolkan dimensi prosedural internal DPR. Berita ketiga (Desember 2024) justru menampilkan headline yang lebih evaluatif: “Butuh Keberanian Politik DPR”. Di sini, struktur berita diarahkan untuk mengkritik DPR melalui suara pengamat hukum. Sementara berita keempat (April 2025) memperlihatkan sintaksis yang lebih otoritatif dengan headline “Alasan Mengapa RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan”. Dengan menempatkan Presiden di posisi utama sejak *lead*, struktur berita semakin persuasif dan menegaskan urgensi nasional.

Dimensi Skrip (5W+1H)

Dari segi skrip, terdapat pergeseran aktor dominan dalam pemberitaan. Berita pertama menekankan pemerintah (KemenkumHAM) sebagai aktor utama, dengan alasan celah hukum yang perlu segera ditutup. Berita kedua menggeser perhatian kepada DPR, dengan hambatan prosedural berupa belum terbentuknya pimpinan komisi. Berita ketiga mengangkat pengamat hukum sebagai aktor penting, yang menyatakan bahwa hambatan bukan teknis melainkan politis. Berita keempat menampilkan Presiden, pengamat, dan ICW secara bersama-sama, sehingga membentuk multi-aktor yang memperkuat legitimasi dorongan pengesahan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa skrip berita tidak statis, tetapi berubah mengikuti konteks politik dan siapa yang dianggap otoritatif dalam mendorong isu.

Dimensi Tematik

Tematik keempat berita juga memperlihatkan evolusi narasi. Pada berita pertama, koherensi narasi sederhana: problem dan solusi legislatif. Narasi ini menekankan kebutuhan teknis untuk mempercepat pengesahan RUU. Berita kedua lebih menekankan pada mandek akibat penyebab procedural dan solusi administratif. Koherensi ini membuat isu tampak sebagai urusan internal DPR yang bersifat rutin. Berita ketiga lebih kompleks dengan struktur penundaan akibat resistensi politik perlu ada evaluasi moral dan tuntutan keberanian. Narasi evaluatif ini menjadikan DPR sebagai pihak yang disorot secara kritis. Pada berita keempat, tematik lebih persuasif dengan pola krisis dan legitimasi otoritas (Presiden, ICW, pengamat) yang mencerminkan sejarah panjang sekaligus rekomendasi tindakan. Pola ini membangun argumen kuat bahwa masalah sudah terlalu lama tertunda dan kini harus segera dituntaskan.

Dimensi Retoris

Dalam hal retoris, keempat berita menggunakan diksi yang berbeda sesuai bingkai masing-masing. Berita pertama menggunakan leksikon teknis seperti percepatan, penyitaan, blokir, yang memberi nuansa teknokratis. Berita kedua memakai diksi birokratis seperti mandek, inventarisasi, prioritas, menekankan rutinitas administratif. Berita ketiga memunculkan diksi moral-konflikual seperti keberanian politik, resistensi, aktor kuat, yang memberi bobot evaluatif pada DPR. Berita keempat memadukan diksi krisis dan otoritatif seperti mendesak, memulihkan kerugian negara, mencegah pelarian aset, sehingga menghasilkan retorika yang kuat untuk

mobilisasi opini publik. Evolusi retorik ini menunjukkan pergeseran dari netral-teknis ke moral-krisis yang lebih persuasif.

SIMPULAN

Dari keempat berita terlihat pola evolusi framing media: dari teknis-birokratis (2015/10), ke prosedural (2024/10), kemudian ke evaluatif-konflikual (2024/12), dan akhirnya ke urgensi otoritatif (2025/4). Pergeseran ini sejalan dengan dinamika politik dan peran aktor yang dikutip media. Hasil ini memperlihatkan bagaimana media menggunakan berbagai perangkat framing (headline, diksi, sumber, narasi) untuk mengonstruksi realitas, sekaligus mengarahkan agenda publik. Dalam konteks teori agenda setting, berita keempat memiliki potensi terbesar mempengaruhi opini publik karena menggabungkan sumber eksekutif, pengamat, dan NGO. Berdasarkan hasil analisis framing model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki terhadap empat berita Tempo.co mengenai RUU Perampasan Aset, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur Sintaksis: Tempo.co secara konsisten menyusun berita dengan menekankan urgensi pengesahan RUU dan memperlihatkan kelambatan DPR. Headline dan *lead* berfungsi sebagai penekanan utama terhadap lambannya proses legislasi.
2. Struktur Skrip: Unsur 5W+1H disajikan dengan lengkap, namun fokus selalu mengarah pada DPR sebagai aktor penghambat. Pemerintah, pakar hukum, dan aktivis dijadikan sumber yang menekankan urgensi.
3. Struktur Tematik: Narasi yang dibangun menekankan kontras antara kebutuhan mendesak reformasi hukum dengan kelambatan politik. Tempo.co menekankan bahwa RUU ini adalah instrumen kunci dalam pemberantasan korupsi.
4. Struktur Retoris: Penggunaan kata dan frasa seperti “mandek”, “mendesak”, dan “butuh keberanian politik” memperkuat kesan bahwa DPR enggan bertindak cepat. Retorika ini membentuk opini publik yang mendukung percepatan pengesahan RUU.

Analisis menunjukkan bahwa framing media terhadap isu RUU Perampasan Aset bersifat dinamis, mengikuti perkembangan konteks politik. Jika pada awalnya masalah dipersepsikan sebagai soal teknis hukum, pada akhirnya ia ditampilkan sebagai krisis nasional yang membutuhkan keputusan segera. Dengan kerangka Pan & Kosicki, terlihat jelas bagaimana dimensi sintaksis, skrip, tematik, dan retorik bersinergi membentuk paket interpretatif yang mengarahkan opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, R. M., Mohammed, R., & Ahmad, M. K. (2016). Issues and consequences of newspaper framing on ethnic conflict: A qualitative study of ethnic group leaders' conflict frames. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32*(2), 294–316. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2016-3202-16>
- Azkiya, A. (2023). Problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme perampasan aset. *Siyasah, 3*(1), 132–147. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231>
- Clemente, M., & Gabbioneta, C. (2017). How does the media frame corporate scandals? The case of German newspapers and the Volkswagen diesel scandal. *Journal of Management

- Inquiry, 26*(3), 287–302. <https://doi.org/10.1177/1056492616689304>
- Deha, D., & Syas, M. (2021). Relasi media, pemerintah, dan publik (Analisis framing dan strukturasi pada Majalah Tempo). *Jurnal Signal, 9*(1), 67–78. <https://doi.org/10.33603/signal.v9i1.3993>
- Hamzah, M., & Esa, I. L. (2020). Uncovering the factors influencing the technological adaptation of Twitter usage among journalists in the transforming journalism practice. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36*(4), 1–15. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2020-3604-01>
- Holton, A. E., Lewis, S. C., & Coddington, M. (2020). Interacting with audiences. In *The Routledge Handbook of Developments in Digital Journalism Studies* (pp. 327–337). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429462030-33>
- Ismail, A. N. (2024). Urgensi pengaturan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (Unexplained Wealth). *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 4*(8), 2705–2718. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2778>
- Kim, H., & Kim, S. H. (2018). Framing marijuana: How U.S. newspapers frame marijuana legalization stories (1995–2014). *Preventive Medicine Reports, 11*, 196–201. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.07.003>
- Kyriakidou, M., & Garcia-Blanco, I. (2021). Introduction: Innovations, transformations and the future of journalism. *Journalism Practice, 15*(6), 723–727. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1935301>
- Muslimah, Fauziah. 'Podcast Sebagai Media Alternatif Praktik Jurnalistik Radio Oleh Tempo'. Jurnal Studi Jurnalistik 4, no. 1 (2022): 13–29. <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i1.25847>
- Najib, M. A. (2023). Polemik pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. *Sosio-Yustisia, 3*(2), 159–175. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.416>
- Nugroho, K., & Hasan, F. N. (2023). Analisis sentimen masyarakat mengenai RUU Perampasan Aset di Twitter menggunakan metode Naïve Bayes. *Smatika Jurnal, 13*(2), 273–283. <https://doi.org/10.32664/smatika.v13i02.899>
- Pantoli, Z. (2023). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi baru melawan korupsi dengan pendekatan in rem). *Journal of Human and Education (JAHE), 4*(6), 1124–1132. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>
- Pastukhov, A. G. (2023). Strategic media framing and attributive agenda. *Vestnik of Samara University. History, Pedagogics, Philology, 28*(4), 115–129. <https://doi.org/10.18287/2542-0445-2022-28-4-115-129>
- Pertiwi, I. D., Dewi, N. A., & Manoppo, P. (2021). Kontruksi realitas terhadap kritik kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. *Syntax Idea, 3*(4), 727–738. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i4.1169>
- Putra, D. K., & Hirzi, A. T. (2022). Hubungan pemberitaan di media online dengan pembentukan opini pada mahasiswa Universitas Islam Bandung. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital, 2*(1), 36–41. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i1.835>
- Ramadhani, N. (2024). RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi oleh KPK: Perspektif teori kepentingan sosial Roscoe Pound. *International Journal of Law and Justice, 2*(2), 8–19. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387>
- Reni., Nursalamah, A. N., Julistiana, R., Musdalipah, & Ramadoni, M. A. (2025). Analisis Framing Berita Pemilihan Raya Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023. Komsospol, 5(1), 28-47. <https://doi.org/10.47637/komsospol.v5i1.1480>
- Ridha, M., Astiani, D., Azkia, A., Ramadhani, A., & Zain, F. M. (2025). Kekuatan Komunikasi: Fungsi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Manusia. Komsospol, 5(1), 48-54. <https://doi.org/10.47637/komsospol.v5i1.1639>
- Rofiqi, L., & Akbar, M. (2024). Analisis sentimen terkait RUU Perampasan Aset dengan Support Vector Machine. *Jurnal Teknik Informatika, 4*(3), 529–538.

<https://doi.org/10.58794/jekin.v4i3.824>

Sari, F. L., Adawiyah, D. P. R., & Moefad, A. M. (2021). Media framing analysis and Islamic minority sect. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 15*(2), 253–265.
<https://doi.org/10.24090/komunika.v15i2.4790>

